

ANAK LAMPIRAN 1
KERANGKA REGULASI

KERANGKA REGULASI

NO.	JUDUL RANCANGAN PERATURAN	UNIT ORGANISASI/ PEMRAKARSA
1	RUU Jasa Konstruksi	Direktorat Jenderal Bina Kontruksi
2	RUU Arsitek	Direktorat Jenderal Cipta Karya
3	RUU Sumber Daya Air	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
4	RPP tentang Rumah Negara	Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan
5	RPP tentang Pemberdayaan Lembaga Jasa Keuangan serta Pelaksanaan Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan dalam Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan
6	RPP tentang Penyelenggaraan Rumah Susun	Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan
7	RPP tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat	Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan
8	RPP tindak lanjut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi	Direktorat Jenderal Bina Kontruksi
9	RPP tentang Penunjukan Badan/Lembaga yang menangani Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan
10	RPP tentang Rumah Negara	Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan

11	RPP tentang Pemberdayaan Lembaga Jasa Keuangan serta Pelaksanaan Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan dalam Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan
12	Raperpres tentang Perubahan Perpres Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam rangka Percepatan Penyediaan Air Minum	Direktorat Jenderal Cipta Karya
13	Raperpres tentang Fungsi, Tugas, Wewenang, Syarat, Larangan, Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Komisioner dan/atau Deputi Komisioner BP Tapera	Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan
14	Raperpres Penugasan Perumnas	Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan
15	Raperpres tentang Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung	Direktorat Jenderal Cipta Karya
16	Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Merupakan Kewenangan Kementerian Yang Dilaksanakan Sendiri atau Dilaksanakan Melalui Dekonsentrasi Atau Tugas Pembantuan	Biro Keuangan
17	Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara	
18	Petunjuk Pelaksanaan Penarikan Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri di Kementerian PUPR	
19	Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Penatausahaan dan Pelaporan	

	Pertanggungjawaban Penerimaan Negara Bukan Pajak di Kementerian PUPR	
20	Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Penatausahaan dan Penyusunan LPJ Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Oleh Atasan Langsung	
21	Penyelenggaraan Sistem Kearsipan Dinamis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	Pedoman Klasifikasi dan Jadwal Retensi Arsip Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
22	Pedoman Sistem Klasifikasi dan Keamanan Arsip Kementerian Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat	Biro Umum
23	Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Elektronik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
24	Penggunaan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Dinas Operasional Pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
25	Tata Cara Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara	Biro Pengelolaan Barang Milik Negara dan Layanan Pengadaan
26	Tata Cara Perencanaan Barang Milik Negara	
27	Standar dan Pedoman Pengadaan Barang Pemerintah	
28	Tata Cara Pengamanan dan Pemanfaatan Barang Milik Negara	

	Kementerian PUPR yang Dikelola oleh Badan Usaha Jalan Tol	Biro Pengelolaan Barang Milik Negara dan Layanan Pengadaan
29	Penggunaan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Dinas Operasional Pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
30	Tata Cara Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Penghapusan dan Pemusnahan Barang Milik Negara pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
31	Penilaian Kinerja Pegawai	Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
32	Uraian Tugas Organik	
	Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPP SPAM)	
33	Sekretariat Dewan SDA Nasional	
34	Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis	
35	Pusat Studi Gempa Bumi Nasional	
36	Sistem Pengelolaan Kepegawaian Secara Elektronik di Kementerian PUPR (e-HRM)	
37	Perubahan Permen PUPR No. 15/PRT/M/2015(substansi terkait Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo)	
38	Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS)	
39	Pemberian Tanda Kehormatan di Kementerian PUPR	
40	Kajian Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Cipta Karya	
41	Perubahan Peraturan Menteri PUPR Nomor 47 Tahun 2015 tentang	Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri

	Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur	
42	Perubahan Peraturan Menteri PU Nomor 18 Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Pengendalian Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri Bidang Pekerjaan Umum	
43	Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum dan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
44	Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
45	Pedoman Penyusunan Anggaran Secara Elektronik (<i>e-Budgeting</i>)	
	Pedoman Penilaian dan Evaluasi Kinerja Secara Elektronik (<i>e-Performance</i>)	
46	Tata Laksana Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Biro Komunikasi Publik
47	Pedoman Pelayanan Publik di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
48	Cetak Biru Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	

49	Penyelenggaraan Data dan Informasi Geospasial Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Pengganti Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 25/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Data dan Informasi Geospasial Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)	Pusat Data dan Teknologi Informasi
50	Pedoman Pengelolaan Sistem Informasi Kehadiran Pegawai di Kementerian Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat	
51	Cetak Biru Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
52	Penyelenggaraan Data dan Informasi Geospasial Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Pengganti Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 25/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Data dan Informasi Geospasial Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)	
53	Kebijakan Pengelolaan Data Elektronik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pusat Data dan Teknologi Informasi
54	Manajemen Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
55	Sistem Manajemen Keamanan	

	Informasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
56	Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2013 tentang Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) Bidang Pekerjaan Umum.	Badan Penelitian dan Pengembangan
57	Pengembangan Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
58	Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai PUPR	
59	Rapermen tentang Danau Danau	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
60	Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Penggunaan dan Pengusahaan Sumber Daya Air	
61	Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2015 tentang Rawa	
62	Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi	
63	Pedoman Perencanaan Jalan Tol	Direktorat Jenderal Bina Marga
64	Pelaksanaan Konstruksi dan Pengoperasian Jalan Tol	
65	Standar Pelayanan Minimal Jalan Nasional	

66	Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Bantuan Pembiayaan Jalan Daerah	
67	Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan Tol	
68	Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Untuk Pengusahaan Jalan Tol	
69	Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Monitoring Konstruksi	
70	Pelaksanaan Evaluasi Lingkup Pada Pelaksanaan Konstruksi Jalan Tol	
71	Pengembangan Sistem Transportasi Cerdas/Intelligent Transport System (ITS) Dalam Penyelenggara- an Jalan Tol	
72	Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Direktorat Jenderal Cipta Karya
73	Kebijakan Dan Strategi Nasional Sistem Pengelolaan Air limbah	
74	Lembaga Wali Amanat Infrastruktur Permukiman	
75	Pedoman Teknis Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Perdesaan	
76	Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman	
77	Pembangunan Infrastruktur Permukiman Berbasis Pemberdayaan Masyarakat	
78	Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman Kawasan Perbatasan Antar Negara	
79	Pedoman Persyaratan Kemudahan	

	Bangunan Gedung	Direktorat Jenderal Cipta Karya
80	Pembangunan Bangunan Gedung Negara	
81	Pedoman Teknis Pembangunan Dan Pemanfaatan Bangunan Gedung di Atas Dan/Atau di Bawah Tanah, Air Dan /Atau Prasarana Umum	
82	Pedoman Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung Fungsi Khusus	
83	Pedoman Teknis Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung	
84	Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum	
85	Penyelenggaraan SPAM Untuk Pemenuhan Kebutuhan Sendiri Oleh Badan Usaha	
86	Penyelenggaraan SPAM	
87	Dokumen Penyelenggaraan SPAM	
88	Pedoman Intensitas Bangunan Gedung	
89	Pedoman Teknis Retrofitting Bangunan Gedung	
90	Pedoman Teknis Bangunan Gedung Tahan Gempa	
91	Pedoman Pembangunan Bangunan Gedung Bertingkat Tinggi	
92	Pedoman Teknis Perencanaan Penampilan Bangunan Gedung	
93	Pedoman Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung	
94	Pedoman Teknis Fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung	
95	Pedoman Teknis Persyaratan Kenyamanan Bangunan Gedung	
	Perubahan Peraturan Menteri PU	

	Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara	Direktorat Jenderal Cipta Karya
96	Pedoman Analisis Dampak Pusaka (usulan baru)	
97	Pedoman Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman (usulan baru)	
98	Pedoman Penyusunan, Penetapan, dan Peninjauan Kembali Rencana Kawasan Permukiman (usulan baru)	
99	Perubahan terhadap Peraturan Menteri PUPR Nomor 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (baru)	
100	Pedoman Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Lingkungan Rumah Tapak	Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan
101	Hak dan Kewajiban Konsumen Rumah Susun Milik	
102	Pedoman Penyelenggaraan Bantuan Rumah Susun Sewa yang dibiayai oleh APBN/APBD	
103	Pedoman Penyediaan Rumah Khusus	
	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Berbasis Komunitas (BSPS-BK)	
104	Penyusunan Pedoman Kemitraan Dalam Mendukung Perumahan	

	Swadaya	Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan
105	Penyusunan Pedoman Pemantau dan Evaluasi Pengembangan Rumah Swadaya	
106	Penyelenggaraan Rumah Susun	
107	Permohonan Izin Rencana Fungsi dan Pemanfaatan serta Pengubahannya	
108	Penyusunan Masukan Teknis Kriteria dan Tata Cara Pemberian Kemudahan Kepemilikan Sarusun Umum	
109	Penyediaan Bahan Bangunan Murah dalam Mendukung Pembangunan Rumah Umum	
110	PSO Selisih Tarif Sewa Pada Rusunawa Yang dibangun Oleh BUMN	
111	Tata Cara Perizinan Rumah Susun Umum dan Komersial	
112	Tata Cara Promosi Rumah Susun Umum dan Komersial	
113	Pengelolaan Rumah Susun Umum dan Komersial	
114	Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun	Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan
115	Perubahan atas Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2012 dan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Hunian Berimbang	
116	Petunjuk Teknis Pengelolaan Lingkungan Rumah Umum	
117	Pedoman Pelayanan Konsumen Rumah Umum dan Komersial	

118	Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Swadaya	Direkorat Jenderal Pembiayaan Perumahan
119	Pembiayaan Perumahan Subsidi Berbasis Tabungan	
120	Standarisasi Dokumen Investasi	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi
	Perubahan Ruang Lingkup Jalan Tol	
121	Pembentukan Simpul Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
122	Registrasi Alat Berat Konstruksi	
123	Kriteria Perguruan Tinggi, Pakar, dan Penilai Ahli	
124	Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Bakuan Kompetensi	
125	Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09/PRT/M/2013 tentang Persyaratan Kompetensi Untuk Subkualifikasi Tenaga Ahli dan Tenaga Terampil Bidang Jasa Konstruksi	
126	Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 35/PRT/M/2006 tentang Peningkatan Pemanfaatan Aspal Buton Untuk Pemeliharaan dan Pembangunan Jalan	
127	Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman	

	Persyaratan Pemberian Ijin Usaha Jasa Konstruksi Nasional	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi
128	Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
129	Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2014 tentang Pedoman Pemberian Ijin Perwakilan Bidang Usaha Jasa Konstruksi Asing	
130	Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi	
131	Pedoman Pengawasan Intern (Pengganti Peraturan Menteri PU Nomor 14/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Pemeriksaan dalam rangka Pengawasan Funfsional di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum)	Inspektorat Jenderal
132	Benturan Kepentingan	
133	Sistem Penanganan Pelaporan Pelanggaran (<i>Whistle Blowing System</i>) di Kementerian PUPR	
134	Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	
135	Penerapan Manajemen Risiko	
136	Audit Berbasis Risiko (<i>Risk Base Audit</i>)	Inspektorat Jenderal

137	Kepatuhan LHKASN	
138	Perubahan Peraturan Menteri PU Nomor 323/PRT/M/2005 tentang Tata Cara Penanganan Masukan dari Masyarakat di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum	
139	Perubahan Peraturan Menteri PU Nomor 06/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Pemeriksaan Konstruksi di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum	
140	Perubahan Peraturan Menteri PU Nomor 07/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Menyeluruh di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum	
141	Perubahan Peraturan Menteri PU Nomor 08/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum	
142	Taman Cerdas	Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
143	Penyusunan Rencana Induk dan Program Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	